

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, terbagi atas beberapa sub-bab. Pertama, landasan teoritis yang berisi audit, audit operasional, sistem pengendalian internal dan piutang usaha. Teori-teori tersebut mengacu dari beberapa buku dan jurnal terkait yang diteliti.

Setelah itu, di bab ini membahas juga mengenai penelitian-penelitian sebelumnya. Pada pembahasan terakhir juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran tersebut.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Audit

Pemeriksaan (audit) merupakan aktivitas pengumpulan bukti tentang informasi untuk membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya sebagai suatu pengendalian terhadap kegiatan perusahaan.

Arens et al (2014: 2) menyatakan audit adalah,

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten.”

Sedangkan menurut Agoes (2016 : 2) audit adalah,

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembuktian dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”





Dari pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan rangkaian kegiatan yang secara teratur untuk memperoleh informasi melalui bukti, apakah informasi tersebut telah sesuai dengan bukti yang didapat atau tidak. Dari bukti yang didapat akan dilakukan analisis untuk dibuat sebagai laporan tentang penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya setiap audit dibagi kedalam beberapa jenis. Pembagian ini dilakukan untuk menentukan sasaran atau tujuan sesuai yang ingin dicapai. Menurut Agoes (2016: 10-11) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.

1) Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2) Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Hak cipta milik IBI IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sedangkan menurut Agoes (2016: 11-15) jika ditinjau dari jenis pemeriksaan,

audit bisa dibedakan atas:

1) *Management Audit (Operasional Audit)*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2) *Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)*

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain).

3) *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4) *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.





## 2. Audit Operasional

Audit operasional atau audit manajemen merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk evaluasi atas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan.

Arens et al menyatakan (2014: 12), Audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.

Menurut Widjaja (2016: 2), Audit operasional (*operational audit*) merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Pada simpulan tentang audit operasional rekomendasi yang umumnya diberikan adalah memperbaiki prosedur.

Sedangkan Agoes (2016 : 11) berpendapat bahwa Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan kegiatan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pada kebijakan operasional perusahaan, yang diharapkan dalam temuannya akan memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen.

Tujuan utama audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi. Menurut Tunggal (2016: 16), audit operasional biasanya dirancang untuk memenuhi satu atau lebih tujuan, yaitu (1) Menilai Kinerja, setiap audit operasional mencakup penilaian kinerja organisasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan (a) tujuan, seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan, serta dengan (b) kriteria penilaian lain yang sesuai. (2) Mengidentifikasi

Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peluang, perbaikan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan.

Auditor dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan memewawancarai individu (apakah dari dalam atau dari luar organisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industry, menggunakan pertimbangan professional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan cara lain yang sesuai. (3)

Mengembangkan Rekomendasi untuk Perbaikan atau untuk Tindak Lebih Lanjut, sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit operasional. Dalam sebanyak hal, auditor dapat membuat rekomendasi tertentu.

Dalam kasus lainnya, mungkin diperlukan studi lebih lanjut di luar ruang lingkup penugasan, di mana auditor dapat menyebutkan alasan mengapa studi lebih lanjut pada bidang tertentu dianggap tepat.

Tunggal (2016: 24) audit operasional dibagi menjadi tiga kategori yang luas, yaitu: fungsional, organisasi, dan penugasan khusus.

Fungsi adalah cara untuk mengkategorikan aktivitas dari suatu bisnis, seperti fungsi penagihan dan fungsi produksi. Audit Fungsional, berkaitan dengan satu atau lebih fungsi dalam organisasi, misalnya efisiensi dan efektivitas dari fungsi penggajian untuk suatu divisi atau untuk perusahaan secara keseluruhan.

Organisasi, menekankan pada seberapa efisien dan efektif fungsi- fungsi organisasi berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk mengkoordinasikan aktivitas merupakan hal yang penting bagi jenis audit.

Dalam audit operasional penugasan khusus, muncul atas permintaan manajemen untuk berbagi jenis audit, seperti menentukan penyebab dari sistem teknologi informasi yang tidak efektif, menyelidiki kemungkinan kecurangan dalam suatu



divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya dari produk yang dimanufakturkan.

Untuk memudahkan auditor dalam melaksanakan audit operasional maka diperlukan prosedur sebagai pedoman kerja. Tanpa adanya prosedur maka pelaksanaan audit operasional tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Agoes (2016 : 11-12) Ada empat tahapan dalam audit operasional, yaitu

1) Survei Pendahuluan (*Preliminary Survey*)

Survey pendahuluan dimaksudkan untuk ,mendapatkan gambaran mengenal bisnis perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf perusahaan serta penggunaan questionnaires.

2) Penelaahan dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Manajemen (*Review and Testing of Management Control System*)

Untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dan pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan. Biasanya digunakan management control questionnaires (*ICQ*), flowchart dan penjelasan narrative serta dilakukan pengetesan atas beberapa transaksi (*walk through the document*)

3) Pengujian Terinci (*Detailed Examination*)

Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.

Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan.

4) Pengembangan Laporan (*Report Development*)

Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini mengenai kewajiban laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dibuat mirip



dengan management letter, karena berisis temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria (standard) yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektivitas, dan ketidakhematan (pemborosan) dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen (*management control system*) yang terdapat di perusahaan.

Dalam menentukan kriteria yang diperlukan untuk suatu kondisi tertentu, auditor harus melakukan *review* terlebih dahulu. Setelah itu, auditor harus menentukan kriteria-kriteria yang tepat untuk kondisi dimana auditor tersebut melakukan pemeriksaan. Tunggal (2016: 42- 44) menyebutkan . beberapa kriteria yang digunakan dalam audit operasional, yaitu:

1) Kinerja historis

Kriteria didasarkan dari hasil aktual dari periode sebelumnya untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah menjadi “lebih baik” atau “lebih buruk” dalam perbandingan. Kriteria ini mudah diambil, tetapi mungkin saja kriteria tersebut tidak memberikan wawasan yang cukup mengenai seberapa baik atau buruk hasil jika dibandingkan dengan apa yang seharusnya didapat.

2) Benchmarking

Entitas di dalam atau di luar organisasi klien mungkin secara memadai serupa dengan organisasi klien sehingga auditor dapat menggunakan hasil operasi mereka sebagai kriteria. Auditor harus cermat dalam memilih organisasi yang akan digunakan untuk benchmark.

3) Standar teknik

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan standar teknik dimana seperti menggunakan *time and motion study* untuk menentukan tingkat output yang dihasilkan. Penggunaan kriteria ini efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah



operasional yang penting. Pembuatan kriteria ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

4)

Diskusi dan kesepakatan

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan operasional. Kriteria ini pada umumnya digunakan karena pembuatan kriteria yang lain sering kali menyulitkan dan membutuhkan biaya yang besar.

3.

### Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016: 129), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

LAPI (2011: 319.2) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Arens, et al (2014: 340-341), sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. Biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu 1)



Keandalan laporan keuangan; 2) Efisiensi dan efektivitas operasi; 3) Ketaatan pada hukum dan peraturan.

1) Keandalan laporan keuangan

Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Beberapa berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan provisi legal anti kecurangan.

Unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal, menurut Mulyadi (2016: 130-135)

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional



kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus ada sistem pembagian wewenang untuk otorisasi.

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional, dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan adalah:

- a. penggunaan formulir berhuruf cetak,
- b. pemeriksaan mendadak,
- c. setiap transaksi tidak boleh dikerjakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit,
- d. perputaran jabatan,
- e. keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak,
- f. secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset dengan catatannya,
- g. pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.



#### 4. Piutang

Piutang adalah tagihan yang diakibatkan penjualan secara kredit pada masa lalu.

Menurut Syakur (2015 : 104) Piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain akibat kejadian di waktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagihan (*collect*) pada tanggal jatuh temponya. Piutang dapat berupa tagihan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau penjualan aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi-transaksi lainnya yang dapat menimbulkan klaim kepada pihak lain.

Menurut Syakur (2015 : 104) Piutang dibedakan menjadi tiga yaitu, piutang usaha, piutang wesel, piutang lain-lain.

Piutang usaha merupakan klaim kepada pihak lain yang timbul akibat penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang merupakan suatu tagihan kepada pembeli yang tidak disertai dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksa debitor untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh temponya.

Piutang wesel atau wesel tagih merupakan taguhan atau piutang yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat perintah membayar (wesel) atau dalam bentuk surat kesanggupan membayar (*promes*).

Piutang lain-lain merupakan klaim kepada pihak ketiga yang timbul karena kejadian di masa lalu yang tidak terkait dengan terjadinya penyerahan barang atau jasa yang diperdagangkan atau diproduksi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada piutang dagang atau usaha yang terjadi pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok.

Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:85-87) sebagai berikut: 1) Volume penjualan kredit, 2) Syarat pembayaran penjualan kredit, 3) Ketentuan tentang pembatasan kredit, 4) Kebijakan dalam pengumpulan piutang, 5) Kebiasaan membayar dari pelanggan.

Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya resiko, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitabiliti.

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat.

Dalam penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafond bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi plafond yang ditetapkan bagi masing-masing langganan berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, jika batas maksimal plafond lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil.



Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan.

Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.

Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash discount akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil, sedangkan langganan membayar periode setelah cash discount akan mengakibatkan jumlah piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk menjadi kas.

Dalam pelaksanaan penjualan secara kredit perusahaan harus berhati-hati dalam memilih pelanggan, karena kesalahan dalam memilih pelanggan akan menimbulkan risiko dalam pengumpulan piutang di masa akan datang. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah preventif menurut Riyanto (2015: 87-90) untuk memperkecil risiko tersebut dengan cara menentukan batas risiko yang akan ditanggung perusahaan sebagai cadangan piutang. Ketentuan persentase ini perlu untuk memperhitungkan keuntungan yang diharapkan akan diterima.

Untuk dapat mengadakan klasifikasi langganan, apakah mereka termasuk golongan risiko 5%, 10%, 15% atau lebih, perusahaan perlu mengadakan penyelidikan mengenai kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Penyelidikan ini tidak hanya menyangkut pada bidang material tetapi juga menyangkut penyelidikan sifat atau watak dari pelanggan, apakah mereka



mempunyai kebiasaan dan kesedian untuk selalu memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan terutama mengenai likuiditas dan rentabilitasnya.

Setelah mengadakan penyelidikan mengenai kemampuan dan keadaan perusahaan, sifat, kebiasaan dan moral perusahaan yang bersangkutan, maka kita dapat mengadakan klasifikasi para langganan berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga terdapat golongan-golongan risiko 5%, 10%, 15% dan seterusnya.

Berdasarkan penggolongan tersebut perusahaan dapat memutuskan untuk tidak memberikan kredit penjual atau memperbesar syarat pembayaran kepada pelanggan-pelanggan yang termasuk dalam golongan risiko yang lebih dari 10%. Dengan demikian maka kredit penjual hanya diberikan kepada para pelanggan dari golongan risiko 10% ke bawah.

Manajemen piutang dagang yang efektif sangat diperlukan agar tidak terjadi kerugian akibat adanya piutang yang tidak dapat ditagih dan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan piutang oleh karyawan. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh adanya piutang yang tidak dapat ditagih atau penyalahgunaan piutang oleh karyawan tidak hanya besar nilai nominal piutang tersebut, melainkan juga meliputi kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (opportunity cost) sebesar tingkat laba investasi dari piutang yang tidak dapat ditagih. Sedangkan kerugian ekonomis yang timbul akibat keterlambatan penerimaan piutang hanya meliputi kerugian atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pemanfaatan ekonomis dari piutang tersebut.

Pengendalian intern terhadap piutang dilakukan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan adanya piutang tidak dapat ditagih, keterlambatan pengumpulan piutang kembali dan penyalahgunaan piutang oleh karyawan. Pengendalian piutang dagang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meliputi; sistem dan prosedur penjualan kredit dan penerimaan piutang, pencatatan piutang yang akurat dan sistem dan prosedur audit yang baik terhadap piutang dagang.

Menurut Syakur (2015 : 105-106) Secara deskriptif, prosedur operasional pengendalian piutang dagang antara lain:

- 1) Pelanggan tetap harus diklasifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan manajemen.
- 2) Transaksi penjualan kredit harus mendapatkan persetujuan bagian kredit berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan.
- 3) Bagian faktur harus menerbitkan faktur berdasarkan prosedur yang baku; yaitu setelah mendapatkan *copy* persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit dan *copy* Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang telah ditandatangani oleh bagian gudang, mencantumkan adanya syarat pembayaran di dalam setiap faktur yang dibuatnya, serta membuat *prelist tape* faktor-faktor yang diterbitkan, dan menyerahkan *prelist tape* beserta *copy* faktur kepada bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan.
- 4) Bagian piutang harus menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan; mempunyai catatan sistematis tentang kredit pelanggan (buku piutang), menyimpan *copy* faktur berdasarkan urutan tanggal jatuh temponya, melakukan analisis umur piutang, dan secara berkala (akhir bulan) membuat dan mengirimkan Surat Pernyataan Piutang (SPP) kepada debitor perusahaan, membuat catatan tentang faktur yang diserahkan ke bagian penagihan untuk dilakukan penagihan setiap harinya, menerima kembali faktur-faktur pada sore harinya serta mencocokkannya dengan catatan faktur yang telah diserahkan, serta membuat *prelist tape* tersebut ke bagian akuntansi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Kegiatan penagihan harus dikendalikan dengan baik berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan; setiap hari harus membuat laporan tentang penagihan yang telah dilakukan, menyerahkan hasil penagihan ke bagian penerimaan kas dan menyerahkan kembali faktur yang tidak dapat ditagih ke bagian piutang.

6) Bagian penerimaan kas menerima hasil penagihan berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan; meneliti dan menghitung kembali rekapitulasi hasil penagihan serta mencocokkannya dengan uang yang diterima dari hasil penagihan, membuat prelist tape penerimaan kas dan menyerahkan prelist tape ke bagian akuntansi.

7) Bagian akuntansi harus melakukan pencatatan piutang berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan; sebelum melakukan pencatatan terlebih dahulu harus mencocokkan prelist tape yang diterima dari bagian pembuatan faktur, dari bagian piutang dan dari bagian penerimaan kas.

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan “berputar” makin lama syarat pembayaran, maka makin lama modal terkait pada piutang sehingga tingkat perputaran piutang (*receivables turnover*) makin rendah.

Rumusan untuk mencari receivable turn over adalah sebagai berikut.

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Rata - rata piutang}}$$

atau

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Piutang}}$$

Untuk menghitung hari rata- rata penagihan piutang (*days of receivable*) dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Days of Receivable} = \frac{\text{Piutang rata - rata} \times 360}{\text{Penjualan kredit}}$$



atau

$$Days\ of\ Receivable = \frac{Jumlah\ hari\ dalam\ 1\ tahun}{Perputaran\ piutang}$$

1. Fred Weston menyebutkan rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam dua tahapan berikut.

a) Penjualan per hari

$$Penjualan\ per\ hari = \frac{Penjualan}{360}$$

b) Hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang

$$Rata - rata\ jangka\ waktu\ penagihan = \frac{Piutang}{Penjualan\ per\ hari}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Masalah Yang Diteliti	Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Teguh Gunawan Setyabudi dan Sutjipto Ngumar 2013	“Audit Operasional Fungsi Penjualan Untuk Menilai Efisiensi Dan Efektivitas Bagian Penjualan PT Ladangrizki Jaya Sentosa Surabaya”	Analisis Deskriptif Dalam Bentuk Studi Kasus	<p>a. Hasil evaluasi pengendalian intern yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern atas fungsi penjualan PT Ladangrizki Jaya Sentosa cukup baik.</p> <p>b. Target yang telah ditetapkan PT Ladangrizki Jaya Sentosa dapat dikatakan efektif.</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				<p>c. Marketing manager kurang selektif dalam melakukan otorisasi biro jasa iklan yang digunakan.</p>
2.	<p>M. Irsyad Harahap 2010</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>“ Penerapan Audit Operasional Terhadap Fungsi Penjualan Dan Piutang Dagang Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Kantor Direksi PTP. Nusantara III (Persero)”</p>	<p>Analisis Deskriptif Dalam Bentuk Studi Kasus</p>	<p>a. Pelaksanaan audit operasional yang dilaksanakan oleh PTPN III telah memadai.</p> <p>b. Penjualan untuk periode tahun 2007 dan 2008 telah dilaksanakan dengan efektif oleh PTPN III.</p> <p>c. Audit operasional berperan dalam menunjang efisiensi, efektivitas penjualan dan piutang dagang pada PTPN III .</p>
3.	<p>Rosy Armaini 2016</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>“Audit Operasional Atas Pengelolaan Piutang Pada PT. Anugerah Wisata Tour &amp; Travel Palembang”</p>	<p>Analisis Deskriptif Dalam Bentuk Studi Kasus</p>	<p>a. Pemberian sanksi kepada pelanggan yang terlambat membayar piutang yang telah jatuh tempo tidak efektif.</p> <p>b. Perusahaan tidak mempunyai kebijakan yang memadai dalam proses pengendalian piutang dan penagihan piutang.</p> <p>c. Tidak adanya konfirmasi dan kelanjutan reservasi pelanggan yang jumlah piutangnya melebihi batas kredit yang diberikan.</p>

### C. Kerangka Pemikiran

Proses audit operasional merupakan evaluasi atas kegiatan operasional

1. Ditangguhkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

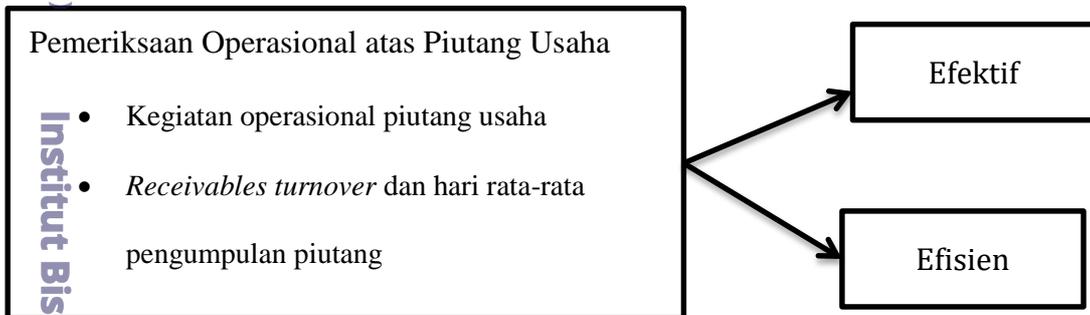
perusahaan, pada penelitian ini piutang usaha menjadi obyek penelitian. Hasil akhir dalam audit operasional adalah untuk memperoleh laporan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas piutang usaha yang ada pada perusahaan.

Penulis akan melihat apakah perusahaan menjalankan SOP yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi di perusahaan untuk melihat efektivitasnya. Selanjutnya efisiensi dinilai dari perbandingan hari rata-rata penagihan (*average collection period*) dan *receivable turn over*.

Dari hasil analisis yang didapatkan, penulis akan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian tersebut dan memberikan masukan bagi perusahaan dalam bagian piutang usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.